



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013.

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013 terdapat kesesuaian dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya perlu disusun standarisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK 02/2012 Standar Biaya Tahun 2013;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak-Pajak yang berlaku, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2013.

Pasal 3

Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengadaan Barang / Jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan / pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 serta dapat dilakukan negosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas dengan memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Patokan harga satuan untuk barang /jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013 ditentukan sebagai berikut :

- a) Patokan Harga Satuan untuk kendaraan operasional dinas dan suku cadangnya, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk;
- b) Patokan Harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan atau agen;
- c) Patokan Harga satuan untuk obat - obatan generik berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- d) Patokan Harga satuan untuk obat-obatan non generik / paten berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan oleh pabrikan-pabrikan setelah ditambah pajak sesuai ketentuan;
- e) Patokan harga alat-alat kesehatan, alat kedokteran, alat laboratorium, perbekalan kesehatan dan bahan laboratorium berdasarkan pada daftar harga yang ditetapkan oleh distributor setelah ditambah pajak sesuai ketentuan;

Pasal 5

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga barang / jasa yang melebihi standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau terdapat barang / jasa yang standar biayanya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini maka untuk pelaksanaannya harus mendapatkan ijin Bupati, yang permohonannya diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan;

Pasal 6


Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional dan mempengaruhi sebagian besar komposisi harga satuan barang / jasa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini jika dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku umum maka akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati ini;





Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 NOV 2012

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

| No | JAGALAN PARAF | |
|----|---------------|---|
| 1. | SEKDA |  |
| 2. | ASPEMIN |  |
| 3. | KBG HKM |  |
| 4. | Ka. DPPKAD |  |